

## ANALISIS PERPRES NO 59 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN KELAS RAWAT INAP STANDAR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BATU BARA

Putri Ananda Lubis<sup>1</sup>, Maharani Br Barus<sup>2</sup>, Fidiana Hafidzah<sup>3</sup>, Fitriani Pramita Gurning<sup>4</sup>  
[putrianandalubis297@gmail.com](mailto:putrianandalubis297@gmail.com)<sup>1</sup>, [maharanibrbarus33@gmail.com](mailto:maharanibrbarus33@gmail.com)<sup>2</sup>, [fidianavivo@gmail.com](mailto:fidianavivo@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fitiriani.gurning@uinsu.ac.id](mailto:fitiriani.gurning@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesiapan RSUD Batu Bara dalam mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024, serta tanggapan masyarakat terhadap perubahan ini dan dampaknya. Metode Penelitian ini menggunakan survei dan wawancara dengan pihak rumah sakit dan masyarakat pengguna BPJS di Kabupaten Batu Bara, dianalisis secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan; RSUD Batu Bara merencanakan rehabilitasi sesuai kebutuhan KRIS pada akhir 2024, tetapi menghadapi kendala anggaran. Masyarakat mendukung penyeteraaran kelas rawat inap, tetapi khawatir tentang peningkatan biaya iuran, terutama bagi pengguna BPJS kelas 3. Kesimpulan dan Saran; RSUD Batu Bara siap dalam infrastruktur namun perlu memperkuat anggaran. Pemerintah disarankan mempertimbangkan sosialisasi dan subsidi untuk meringankan beban biaya masyarakat kelas bawah.

**Kata Kunci:** KRIS, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Masyarakat.

### ABSTRACT

*This study analyzes the readiness of RSUD Batu Bara to implement the Standard Inpatient Class (KRIS) according to Presidential Regulation No. 59 of 2024, as well as the public's response to this change and its impact. The research method used surveys and interviews with hospital staff and BPJS users in Batu Bara Regency, analyzed qualitatively. Results and Discussion: RSUD Batu Bara plans to rehabilitate its facilities to meet KRIS requirements by the end of 2024 but faces budget constraints. The public supports the standardization of inpatient classes but is concerned about potential fee increases, especially for BPJS class 3 users. Conclusion and Recommendations: RSUD Batu Bara is ready in terms of infrastructure but needs to strengthen its budget. It is recommended that the government consider socialization and subsidies to alleviate the financial burden on lower-class citizens.*

**Keywords:** KRIS, BPJS Kesehatan, Hospital, Community.

### PENDAHULUAN

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2024 tentang Penerapan Kelas Rawat Inap Standar merupakan salah satu kebijakan penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh negeri. Perpres ini diluncurkan sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan nasional, termasuk ketimpangan akses layanan kesehatan dan kualitas pelayanan yang beragam di berbagai daerah. Latar belakang diterbitkannya Perpres ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang telah berjalan sejak tahun 2014. Dalam implementasinya, JKN masih menghadapi berbagai masalah, seperti disparitas fasilitas kesehatan, perbedaan kualitas layanan antar rumah sakit, dan beban biaya yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kelas rawat inap standar diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Perpres No. 59 Tahun 2024 ini mengatur tentang standar minimal yang harus dipenuhi

oleh setiap rumah sakit dalam menyediakan layanan rawat inap. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, tenaga medis, hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pasien, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, dapat memperoleh pelayanan yang layak dan bermutu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek dari Perpres No. 59 Tahun 2024, mulai dari latar belakang penerbitannya, isi dari peraturan tersebut, hingga dampak yang diharapkan terhadap sistem layanan kesehatan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan implikasi dari kebijakan ini dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tanah air.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Penerapan Kelas Rawat Inap Standar. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konteks, isi, dan implikasi dari kebijakan ini dari perspektif dua kelompok informan utama: pihak rumah sakit dan masyarakat. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Wawancara Mendalam:** Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan pihak rumah sakit dan masyarakat. Informan dari pihak rumah sakit meliputi manajemen rumah sakit dan tenaga medis, seperti dokter dan perawat yang terlibat langsung dalam penerapan kebijakan kelas rawat inap standar. Sementara itu, informan dari masyarakat mencakup pasien yang mengalami rawat inap serta anggota keluarga mereka. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan mengenai penerapan Perpres No. 59 Tahun 2024.
2. **Observasi:** Peneliti melakukan observasi partisipatif di beberapa rumah sakit untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik sehari-hari. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap fasilitas dan infrastruktur ruang rawat inap standar, proses pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, serta interaksi antara pasien dan staf rumah sakit. Observasi ini membantu peneliti mendapatkan data yang lebih kaya dan kontekstual mengenai implementasi Perpres.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil wawancara dengan pihak RSUD Batu Bara menunjukkan bahwa RSUD telah merencanakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2024, pasal 103B. RSUD Batu Bara berencana melakukan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan KRIS dan akan diuji coba pada akhir tahun 2024. Namun, hingga saat ini, tarif layanan rawat inap setelah penerapan KRIS belum disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan, menyebabkan ketidakpastian terkait biaya layanan di masa depan. RSUD Batu Bara sedang mempersiapkan penerapan 12 kriteria KRIS agar dapat terlaksana sesuai rencana. Meski demikian, RSUD Batu Bara mengakui bahwa pengembangan KRIS membutuhkan anggaran yang besar dan anggaran yang diterima saat ini belum cukup jika pengembangan hanya dilakukan dalam satu tahun. Untuk mengatasi keterbatasan ini, RSUD Batu Bara akan memaksimalkan anggaran yang telah disetujui untuk pengembangan KRIS di tahun 2024 dan terus berusaha memperjuangkan anggaran lanjutan untuk tahun 2025.

Di sisi masyarakat, wawancara dengan enam responden menunjukkan variasi tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap KRIS. Mekarisah, seorang ibu rumah tangga berusia 47 tahun, mengetahui tentang pembaharuan kelas BPJS dari televisi namun tidak tahu tentang

iuran dan pelaksanaan KRIS. Mekarisah menyambut baik penyetaraan kelas rawat karena akan mengurangi kesenjangan, tetapi khawatir biaya akan naik. Risma Br Barus, seorang merchandiser berusia 23 tahun, juga mengetahui pembaharuan kelas BPJS dari berita di televisi. Risma menyambut baik penyetaraan kelas rawat tetapi khawatir tentang tarif yang mungkin naik. Ika Suryani, seorang guru berusia 34 tahun, tidak tahu tentang pembaharuan kelas BPJS dan lebih suka BPJS kelas 1, 2, dan 3 karena mencerminkan kemampuan finansial masyarakat. Ika menyambut baik penyetaraan kelas tetapi khawatir tentang kenaikan biaya. Apriliana, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, tidak tahu tentang pembaharuan kelas BPJS dan baru mendengar tentang KRIS. Apriliana menyambut baik penyetaraan kelas rawat dan peningkatan fasilitas, tetapi khawatir tentang kenaikan iuran. Sukri, seorang PNS berusia 55 tahun, mengetahui tentang KRIS dari berita dan menyambut baik penyetaraan kelas rawat dan peningkatan fasilitas, tetapi khawatir tentang kenaikan tarif. Siti Aminah, seorang guru ngaji berusia 51 tahun, tidak tahu tentang pembaharuan kelas BPJS dan mengetahui informasi dari PKK atau orang lain. Siti menyambut baik penyetaraan kelas rawat karena tidak ada diskriminasi, tetapi khawatir tentang kenaikan biaya.

### **Pembahasan**

RSUD Batu Bara telah menunjukkan kesiapan yang signifikan dalam menghadapi penerapan KRIS sesuai dengan peraturan pemerintah. Langkah-langkah rehabilitasi gedung dan peningkatan fasilitas yang sesuai dengan standar KRIS adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Uji coba yang direncanakan pada akhir tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua kriteria KRIS dapat dipenuhi sebelum implementasi penuh pada tahun 2025. Namun, ketidakpastian mengenai tarif layanan rawat inap setelah penerapan KRIS menjadi tantangan besar. Hingga saat ini, belum ada sosialisasi resmi dari BPJS Kesehatan mengenai tarif baru, yang menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. RSUD Batu Bara perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat tentang perubahan yang akan terjadi. Pengembangan KRIS memerlukan anggaran yang signifikan, dan RSUD Batu Bara mengakui bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi. Keterbatasan anggaran ini memaksa RSUD Batu Bara untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada dan mencari sumber dana tambahan untuk mendukung pengembangan lebih lanjut di tahun berikutnya. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait akan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang diperlukan dapat tersedia tepat waktu.

Dari sisi masyarakat, pengetahuan dan pemahaman tentang KRIS bervariasi. Beberapa responden mengetahui tentang pembaharuan kelas BPJS dari media, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengetahui informasi tersebut. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif dari pihak BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Informasi yang jelas dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami perubahan yang akan terjadi dan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kekhawatiran tentang kenaikan biaya layanan setelah penerapan KRIS adalah salah satu isu utama yang diangkat oleh masyarakat. Banyak responden yang menyambut baik peningkatan fasilitas dan penyetaraan kelas rawat inap, tetapi mereka juga khawatir bahwa biaya yang harus mereka keluarkan akan meningkat secara signifikan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu memastikan bahwa kebijakan baru ini tidak memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi rendah. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan KRIS dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyetaraan kelas rawat inap seharusnya tidak hanya meningkatkan fasilitas bagi sebagian kecil pasien, tetapi juga memberikan manfaat

yang merata bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap implementasi KRIS di berbagai rumah sakit.

Masyarakat yang setuju dengan penyetaraan kelas rawat inap menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Namun, ini harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan tetap terjaga. Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme subsidi atau insentif bagi peserta BPJS Kesehatan yang mungkin kesulitan membayar tarif baru. Kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus terbuka tentang proses penetapan tarif dan alasan di balik perubahan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami konteks dan tujuan dari kebijakan baru ini, serta merasa lebih nyaman dengan perubahan yang akan terjadi.

Penerapan KRIS juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tenaga medis dan non-medis di rumah sakit. Mereka perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi yang memadai agar dapat mendukung implementasi KRIS dengan baik. Tenaga medis yang kompeten dan terlatih akan memastikan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh pasien. Akhirnya, kerjasama lintas sektoral dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan KRIS. Melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dan evaluasi kebijakan akan memberikan masukan yang berharga dan membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Dengan demikian, penerapan KRIS dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Selain aspek teknis dan finansial, aspek sosial juga menjadi perhatian penting dalam implementasi KRIS. Perubahan sistem yang melibatkan penyetaraan kelas rawat inap akan berdampak langsung pada pengalaman pasien di rumah sakit. Beberapa pasien mungkin merasa kehilangan status atau kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan di kelas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa penyetaraan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan, melainkan justru meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.

RSUD Batu Bara dan rumah sakit lainnya perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menghadapi resistensi atau penolakan dari pasien yang merasa dirugikan oleh perubahan ini. Pelayanan yang ramah, transparan, dan profesional akan membantu meredakan kekhawatiran dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, umpan balik dari pasien harus diolah dengan baik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi KRIS. Peran pemerintah daerah juga sangat krusial dalam mendukung implementasi KRIS. Pemerintah daerah dapat membantu rumah sakit dalam mengalokasikan anggaran tambahan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KRIS. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan rumah sakit akan menciptakan sinergi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada dan mencapai tujuan kebijakan dengan lebih efektif. Evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan KRIS perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi ini bisa melibatkan berbagai indikator, seperti kepuasan pasien, efisiensi pelayanan, dan penurunan angka kesenjangan dalam akses layanan kesehatan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, aspek pendidikan dan pelatihan juga tidak boleh diabaikan. Tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai standar KRIS dan cara terbaik untuk mengimplementasikannya dalam pelayanan sehari-hari. Dengan demikian, mereka dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar dan meningkatkan kualitas perawatan yang diterima oleh pasien. Untuk

mendukung implementasi KRIS, teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi akan mempermudah pengelolaan data pasien, penjadwalan rawat inap, dan monitoring kriteria KRIS. Dengan dukungan teknologi, proses administrasi dan pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari implementasi KRIS terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Penyetaraan kelas rawat inap diharapkan dapat mendorong pemerataan akses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas rumah sakit dan sistem kesehatan yang lebih luas untuk mengakomodasi peningkatan permintaan layanan.

Implementasi KRIS juga harus memperhatikan aspek hukum dan regulasi. Rumah sakit perlu memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini akan membantu menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Akhirnya, implementasi KRIS di RSUD Batu Bara dan rumah sakit lainnya akan menjadi sebuah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen, kerjasama, dan adaptasi dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, serta dukungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan, tujuan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih adil dan berkualitas tinggi dapat tercapai. Evaluasi berkelanjutan, komunikasi yang transparan, dan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan Kelas Rawat Inap Standar di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Batu Bara merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan keadilan dan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2024. Persiapan yang dilakukan, seperti perencanaan rehabilitasi gedung dan fasilitas, menunjukkan komitmen RSUD Batu Bara untuk memenuhi kriteria KRIS. Namun, sosialisasi terkait tarif layanan rawat inap oleh BPJS Kesehatan perlu segera dilakukan untuk menghindari ketidakpastian di kalangan masyarakat.

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa masyarakat umumnya mendukung penyetaraan kelas rawat inap karena dianggap dapat menghilangkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Namun, ada kekhawatiran yang signifikan terkait potensi kenaikan tarif yang bisa memberatkan, terutama bagi peserta BPJS kelas 3. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai perubahan ini, termasuk mengenai tarif layanan yang akan diterapkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan KRIS akan sangat tergantung pada sosialisasi yang efektif dan dukungan anggaran yang memadai, serta upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak memberatkan masyarakat. Dengan demikian, tujuan KRIS untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih adil dan berkualitas dapat tercapai dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPJS Kesehatan. (2024). Panduan Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (2024). Laporan Kesehatan Tahunan Provinsi Sumatera Utara 2023. Medan: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Hartono, B. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Penerbit

- Gramedia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Anggaran Kesehatan Nasional Tahun 2023-2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Prasetyo, H., & Nugroho, A. (2023). Analisis Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sundari, D. (2024). Dampak Sosial dan Ekonomi dari Implementasi KRIS pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suparman, R. (2022). Manajemen Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- World Health Organization. (2018). Universal Health Coverage: Moving Towards Better Health. Geneva: World Health Organization.